

## RINGKASAN

Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan terkait peran Pemerintah Kota Probolinggo dalam mendorong keberhasilan Program *One Pesantren One Product* (OPOP), yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan peran pesantren dan UMKM lokal. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan wawancara mendalam terhadap 12 informan kunci serta observasi lapangan yang berlangsung selama tiga bulan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung implementasi program, sejumlah kendala masih menghambat efektivitas pelaksanaan, seperti lemahnya koordinasi dan minimnya pelatihan kewirausahaan. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa perlu ada penguatan peran pemerintah dalam memberikan pendampingan berkelanjutan dan fasilitasi pelatihan bagi pelaku pesantren dan UMKM. Rekomendasi utama mencakup pengembangan kapasitas institusi pelaksana dan perbaikan sinergi antar pemangku kepentingan guna mengoptimalkan program OPOP.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, Peran Pemerintah, OPOP, Pemberdayaan Pesantren, UMKM.

## SUMMARY

*This study aims to examine the implementation of policies related to the role of the Probolinggo City Government in promoting the success of the One Pesantren One Product (OPOP) Program, which is designed to improve community welfare by strengthening the role of Islamic boarding schools (pesantren) and local micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The research was conducted using a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews with 12 key informants and field observations carried out over a three-month period. The findings reveal that although the local government has taken strategic steps to support program implementation, several obstacles still hinder its effectiveness, such as weak coordination and limited entrepreneurship training. Based on these results, it is concluded that the government's role needs to be strengthened through sustained mentoring and the facilitation of relevant training for pesantren and MSME actors. The main recommendations include developing the capacity of implementing institutions and enhancing synergy among stakeholders to optimize the OPOP program.*

**Keywords:** *policy implementation, government role, OPOP, pesantren empowerment, MSMEs.*